

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
(Studi pada Kelompok Mojokrapak Berseri di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

Dewi Fitrianingrum

12040674037 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email : dewifitringrum77@gmail.com

Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

0023097908 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email: wena_23979@yahoo.com

Abstrak

KRPL merupakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita, untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui kegiatan budidaya tanaman dan ternak unggas atau ikan. Desa Mojokrapak di Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa sasaran program KRPL yang telah memperoleh berbagai penghargaan baik nasional maupun lokal, serta telah menjadi daerah percontohan. Namun, disisi lain masih dijumpai permasalahan yang dapat menghambat tujuan program ini. Berdasarkan hal inilah perlu dideskripsikan evaluasi pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak ,Tembelang, Jombang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan lokasi sasaran program di Desa Mojokrapak dengan sasaran kelompok Mojokrapak Berseri telah memenuhi kriteria ketepatan. Namun, dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak ini belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dana hibah diberikan berupa uang karena kelompok sasaran telah memiliki kepengurusan yang jelas, tetapi harus diimbangi dengan adanya kontrol dan pelaporan keuangan secara rutin dan berkala kepada dinas terkait. Pendampingan seharusnya diberikan sampai tahap pendampingan, dan seharusnya ada kerja sama dengan media dalam menyiarkan perkembangan pelaksanaan program KRPL untuk memotivasi masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program, KRPL

Abstract

KRPL is the optimization of yard utilization which did through efforts to empower women, to optimize the benefits of the yard as a family food source through cultivation of crops and poultry or fish. Mojokrapak village in Jombang Regency is one of the targeted villages KRPL program that has received various awards both national and local, and has been a pilot area. However, on the other hand still encountered problems that can hinder the objectives of this program. Based on this the evaluation of the program need to be described in the KRPL Mojokrapak Village, Tembelang, Jombang. This research approach using qualitative methods.

The results showed that the location selection program in the Mojokrapak Village with the Mojokrapak Berseri target group has fullfild the accuracy criteria . However, in the implementation of the program in the KRPL Mojokrapak Village has not meet the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, grading, and responsiveness. Hence the advice that can be given is preferably given in the form of cash grants for the target group has had stewardship clear, but it must be balanced with the control and financial reporting regularly and periodically to the relevant departments. Assistance should be given to mentoring stage, and there should be cooperation with the media in broadcasting to report the progress of implementation KRPL program to motivate the society .

Keywords: Evaluation, Program Implementation, KRPL

PENDAHULUAN

Pangan sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas gizi yang baik, akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perlu

diperhatikan dengan baik demi kelangsungan hidup suatu bangsa itu sendiri, karena pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketahanan

pangan secara berkelanjutan. Menyikapi amanat tersebut, maka pemerintah sebagai aktor kebijakan seharusnya mengambil sebuah kebijakan untuk mewujudkannya. Kebijakan menurut Dye dalam Widodo (2009:12) merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).

Kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, salah satunya dengan diciptakannya Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Program P2KP diimplementasikan melalui tiga program kegiatan yaitu, (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Namun, dalam penelitian ini akan difokuskan pada program KRPL, karena kegiatannya mudah dijalankan dan dapat dilaksanakan pada semua rumah tangga serta memiliki tujuan dan manfaat yang sangat baik.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2013, diterangkan bahwa KRPL merupakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita, untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Kegiatan dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Tujuan dari pengembangan KRPL adalah:

- Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga;
- Meningkatkan penganekaragaman pangan;
- Meningkatkan kualitas gizi keluarga;
- Meningkatkan pendapatan keluarga;
- Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa (*Juknis Pengembangan KRPL Plus Plus Jawa Timur, 2016*).

KRPL merupakan program nasional, yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang juga menerapkan program KRPL. Oleh karena itu dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, maka Jawa Timur turut mengembangkan konsep KRPL yang sering dikenal dengan konsep “Pengembangan KRPL Plus Plus”. Salah satu daerah di

Jawa Timur yang telah menerapkan konsep KRPL adalah Kabupaten Jombang. Dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kelompok KRPL di Kabupaten Jombang telah tersebar pada 26 desa. Dari beberapa desa tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada KRPL Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang. Lokasi ini dipilih karena Program KRPL di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang dapat berjalan dengan baik. KRPL di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang atau yang sering disebut kelompok Mojokrapak Berseri dirintis pada akhir tahun 2013. Diawal kemunculannya, desa ini mampu berkembang dengan baik bahkan telah berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Adikarya Pangan Nusantara 2014 mewakili Jawa Timur, Juara Desa Berseri Tingkat Madya 2014 se-Jatim, Desa Mandiri Tingkat Mandiri 2015, Juara III dalam Lomba Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) se-Provinsi tahun 2015. Selain keberhasilannya dalam memperoleh berbagai penghargaan dalam beberapa perlombaan, KRPL Desa Mojokrapak juga mampu menjadi percontohan bagi daerah lain. Salah satunya pernah mendapat kunjungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung untuk dijadikan desa percontohan. Meskipun demikian, realita di lapangan masih dijumpai beberapa tujuan dari KRPL yang belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi perbandingan lingkungan berikut ini :



Sumber : Dokumentasi Kelompok dan Dokumentasi Peneliti

Gambar 1.1 Perbandingan Kondisi Pekarangan KRPL Desa Mojokrapak

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, penanaman tidak hanya dilakukan di pekarangan rumah warga, tetapi juga pada fasilitas umum desa seperti pinggir-pinggir jalan desa dan juga lingkungan mushola. Saat itu tanaman tampak lebih rimbun daripada kondisi saat ini. Bahkan penataannya pun dibatasi dengan pagar-pegar dari bambu yang ditata dengan sangat rapi. Sedangkan kondisi saat ini tanaman yang di tanam terlihat ala kadarnya dan sedikit jumlah serta jenisnya.

Jika diamati pada kondisi saat ini yakni tanaman dengan jumlah dan jenis yang sedikit tersebut, tentunya

tidak akan mampu memenuhi konsumsi harian tiap keluarga, apalagi sampai lebih dan dapat dijual.

Berdasarkan realita pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak tersebut, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat tujuan dari program KRPL. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan evaluasi untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan program tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuan program serta hasilnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Studi pada kelompok Mojokrapak Berseri di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program KRPL pada Kelompok Mojokrapak Berseri di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Evaluasi sangat penting karena kegiatan ini dilakukan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Menurut Muhadjir dalam Widodo (2012: 112), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah efektif dan apakah kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari kegiatan menilai yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan untuk selanjutnya ditutup agar kebijakan dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. William N. Dunn (2003:429) merumuskan 6 (enam) kriteria dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut :

a. Efektivitas

Pengukuran efektivitas dalam program atau kebijakan menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan. Artinya efektivitas ini berkenaan dengan apakah suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Apabila program telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

b. Efisiensi

Efisiensi dalam suatu kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam suatu kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan masalah. Artinya kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada mampu memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Perataan itu adil, artinya menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan kebijakan. Responsivitas Responsivitas juga dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak positif maupun negatif.

METODE

Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, subjek yang dipilih dengan teknik ini merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Seksi DKP Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Ibu Nikmah.
2. Pendamping KRPL Desa Mojokrapak, Bapak Didik dan Ibu Elis.
3. Masyarakat Desa Mojokrapak.

Berikut karakteristik informan yang dipilih:

Tabel 3.1 Karakteristik Informan dalam Penelitian di Desa Mojokrapak

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Nikmah (Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang)	Perempuan	PNS
2	Didik Supiyanto (Pembina KRPL Desa Mojokrapak)	Laki-laki	PNS
3	Elis (Bendahara KRPL Desa Mojokrapak)	Perempuan	Ibu Rumah Tangga dan Kader Posyandu
4	Kholifah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
5	Koni'ah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
6	Umi	Perempuan	Ibu Rumah Tangga

Lofland dan Loeftland (1984) dalam Moleong (2011:157) menyatakan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiyono (2008:62) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber. Data sekunder menurut Sugiyono (2008:62) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, Juknis KRPL Plus Plus Jatim,

Permentan No. 15 Th. 2013, Arsip Desa, buku dan catatan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain pedoman wawancara, alat perekam suara (tape recorder), kamera, dan lembar catatan data (catatan lapangan).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2008: 89-90). Aktivitas dalam analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik pada intinya adalah apapun tindakan atau keputusan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi/ menyikapi masalah publik. Tindakan atau keputusan yang dibuat berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan perwujudan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam rangka menciptakan kemandirian pangan. Program KRPL merupakan program nasional, namun dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan program di masing-masing daerah. Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa sasaran KRPL yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program ini pedoman yang digunakan mengacu pada Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Plus Plus Jawa Timur bagi TP-PKK Desa/ Kelurahan.

Program ini mulai dilaksanakan di Desa Mojokrapak pada akhir tahun 2013 dan masih berjalan hingga saat ini. Program KRPL di Desa Mojokrapak ini dilaksanakan oleh Kelompok Mojokrapak Berseri. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Program KRPL di Desa Mojokrapak ini masih terdapat kendala yang dapat menghambat tujuan dari program, sehingga perlu adanya suatu evaluasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2003) yang menyebutkan bahwa dalam mengevaluasi program perlu adanya kriteria-kriteria yang dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi suatu kebijakan atau program. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, peraturan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas dalam suatu kebijakan atau program diukur dari apakah suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya program KRPL di Desa Mojokrapak secara keseluruhan telah efektif dilaksanakan, namun kondisi ini terjadi pada awal-awal program berjalan dan menjelang perlombaan semata yakni sekitar tahun 2014 dan 2015. Sedangkan pada kondisi saat ini dalam pelaksanaannya program KRPL secara keseluruhan tidak berjalan efektif lagi, karena belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Awalnya masyarakat sangat terbantu dengan adanya program KRPL ini. Karena pada saat itu hasil pekarangan sangat melimpah, sehingga ketersediaan dan cadangan pangan keluarga terpenuhi. Hasil pekarangan yang melimpah tersebut juga meningkatkan penganeekaragaman pangan keluarga. Sehingga kualitas gizi keluarga terpenuhi karena hasil yang dikonsumsi aman dari zat-zat kimia yang berbahaya. Selain untuk dikonsumsi sendiri, hasil pekarangan tersebut juga dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, hasil pekarangan juga telah diolah menjadi berbagai produk olahan pangan seperti nugget lele, 15 macam stik sayuran dan sirup markisa. Dengan demikian perekonomian kreatif di Desa Mojokrapak ini juga pernah berkembang.

Namun, pada saat ini kondisi tersebut tidak berjalan seperti demikian lagi. Jumlah dan jenis tanaman yang tumbuh di pekarangan masyarakat KRPL Desa Mojokrapak sangat sedikit. Dengan kondisi tersebut maka ketersediaan dan cadangan pangan keluarga tidak bisa terpenuhi. Jenis tanaman yang banyak tumbuh adalah sejenis daun ubi jalar, kemangi, dan rumput liar. Dengan jenis tanaman yang demikian, tentu konsumsi pangan keluarga menjadi tidak beragam. Karena hasil pekarangan sedikit, maka masyarakat pun harus mengeluarkan biaya belanja untuk membeli kebutuhan pangannya. Akibatnya gizi masyarakat menjadi kurang terjamin kualitasnya, karena kebutuhan pangan yang diperoleh dari membeli belum tentu aman dari zat-zat kimia. Sedangkan kebutuhan pangan yang

ditanam sendiri lebih terjamin kualitas gizinya, karena dalam prosesnya ditanaman secara organik. Selanjutnya dalam kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari daur ulang sampah seperti pemanfaatan bungkus kopi untuk dompet, tempat tisu dan tas serta pembuatan produk olahan pangan seperti pembuatan nugget lele, 15 macam stik sayuran dan sirup markisa juga tidak mampu berkembang. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan tersebut sangat menuntut ketekunan dan keuletan masyarakat. Namun pada realitanya masyarakat merasa kurang ulet dan telaten dalam membuat kerajinan tangan sehingga mereka menjadi malas dalam mengembangkan kegiatan ini. Selain itu untuk menghasilkan satu produk saja membutuhkan waktu yang lama, maka dari itu masyarakat merasa tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dengan terhentinya kegiatan ketrampilan membuat kerajinan dari daur ulang sampah dan kegiatan membuat olahan pangan, maka tujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di setiap desa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dapat dikatakan tidak lagi berjalan secara efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi dapat diketahui dari jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Artinya kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Dalam pelaksanaannya program KRPL di Desa Mojokrapak dapat dikatakan belum efisien. Setiap lokasi sasaran KRPL di Jawa Timur akan mendapatkan bantuan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang diwujudkan berupa barang dengan jenis bantuan berupa bibit sayur dan buah, bibit ikan dan sarana untuk produksi. Namun, pada realitanya pemberian bantuan hibah berupa barang ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih perlu mengeluarkan biaya tambahan demi berjalannya program KRPL ini yakni berupa pembelian bibit sayur dan buah serta polybag.

Ternyata tidak hanya pada budidaya tanaman, hal serupa juga terjadi pada kegiatan budidaya ternak. Bantuan bibit ternak yang pernah diberikan adalah lele, ayam dan bebek. Bantuan ini diberikan langsung dari Provinsi melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang. Modal seperti bibit ternak ternyata dianggap kurang efisien, karena ketika sampai di tangan Kelompok KRPL kondisinya telah berubah dan banyak yang mati.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam suatu kebijakan atau program adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak secara keseluruhan telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hasil yang diperoleh dari KRPL cukup untuk memenuhi konsumsi harian masyarakat bahkan lebih, sehingga dapat dijual hasilnya, dan pendapatan tersebut masuk pada kas kelompok. Maka dari itu, masyarakat pun merasa puas dengan adanya program KRPL ini, karena yang sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk membeli sayuran. Namun kondisi tersebut terjadi saat jumlah dan jenis tanaman yang ditanam banyak. Sedangkan pada kondisi saat ini jumlah dan jenis tanaman sangat sedikit, sehingga tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, apalagi lebih dan dapat dijual. Sehingga pada kondisi saat ini masyarakat menjadi tidak puas, karena harus mengeluarkan biaya untuk membeli sayuran dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Dengan demikian pelaksanaan program KRPL dapat dikatakan pada saat ini belum memenuhi kriteria kecukupan.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Desa Mojokrapak terbagi dalam 7 dusun. Dari tujuh dusun tersebut, program KRPL di Desa Mojokrapak telah direalisasikan di Dusun Bulak. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan dekat dengan domisili Kepala Desa, sehingga pengawasannya diharapkan lebih mudah. Kawasan tersebut meliputi wilayah RW 1 dan RW 2. Kawasan RW 1 meliputi wilayah RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Sedangkan kawasan RW 2 meliputi wilayah RT 1, RT 2, dan RT 3. Meskipun demikian, tetapi realitanya wilayah dan masyarakat yang dominan melaksanakan kegiatan KRPL hanya RW 2 dan sebagian RW satu. Namun, pada realitanya kawasan RW 2 saja tidak semua masyarakatnya juga

mudah digerakkan untuk turut serta dalam kegiatan budidaya.

5. Responsivitas

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak diketahui bahwa respon masyarakat Desa Mojokrapak saat ini kurang baik dalam melakukan budidaya tanaman.

kegiatan KRPL di Desa Mojokrapak ini telah berhenti sejak puasa tahun kemarin atau sekitar bulan Juli 2015 hingga saat ini. Kurang responnya masyarakat dalam kegiatan budidaya tanaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor alam seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, perubahan kondisi tanah, dan munculnya hama tanaman. Faktor psikis seperti masyarakat yang mulai jenuh dengan adanya kegiatan budidaya, serta kesadaran masyarakat akan budidaya tanaman yang kurang. Sementara kegiatan pendampingan dari provinsi juga hanya sampai tahap pengembangan dan pemanfaatan, tidak sampai pada tahap kemandirian.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan atau program berkenaan dengan ketepatan indikator keberhasilan kebijakan lainnya. pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak telah memenuhi kriteria ketepatan karena baik dari pemilihan sasaran lokasi maupun sasaran kelompok penerima program telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Desa Mojokrapak telah memenuhi kriteria yang diminta oleh provinsi yakni lokasi mudah memperoleh air. Begitu pun dengan Kelompok Mojokrapak Berseri juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2013, karena jumlah masyarakat dalam kawasan ini adalah 229 KK dengan jumlah wuwung sebanyak 188 buah serta telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Nomor 188/22/415.58.11 / 2013 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Berseri Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2013.

PENUTUP

A. Simpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak belum memenuhi kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003). Pemilihan lokasi sasaran program di Desa Mojokrapak dengan sasaran kelompok Mojokrapak Berseri telah

memenuhi kriteria ketepatan. Namun, dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak ini belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas.

Pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak ini secara keseluruhan belum berjalan sesuai dengan tujuan, karena jumlah dan jenis tanaman yang dihasilkan sedikit, serta kegiatan membuat ketrampilan dari daur ulang sampah dan kegiatan olahan pangan tidak berkembang. Masih terdapat kendala dari segi efisiensi seperti bantuan hibah yang diberikan pemerintah provinsi belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bibit, polybag dan pakan ternak. Kendala lainnya adalah respon masyarakat terhadap program KRPL ini berkurang. Hal itu disebabkan karena faktor alam seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, perubahan kondisi tanah, dan munculnya hama tanaman serta adanya faktor psikis seperti masyarakat yang mulai jenuh dengan adanya kegiatan budidaya dan kesadaran masyarakat akan budidaya tanaman yang kurang.

B. Saran

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, evaluasi pelaksanaan program KRPL di Desa Mojokrapak Tembelang Jombang masih belum dapat memenuhi 5 kriteria evaluasi dari 6 kriteria evaluasi yang ada. Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif dalam perbaikan program, di antaranya :

- a. Pemerintah provinsi hendaknya memberikan bantuan hibah berupa uang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan KRPL, tidak berupa barang. Hal tersebut dikarenakan kegiatan budidaya tidak menentu dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Selain itu barang yang diberikan secara bertingkat-tingkat dari provinsi ke kabupaten lalu ke desa membuat kondisi barang bantuan berupa bibit kondisinya menjadi tidak optimal. Ditambah lagi program ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki kepengurusan dan struktur organisasi yang jelas. Hendaknya pemerintah dapat mempercayakan kepada kelompok untuk mengelola keuangannya. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya kontrol dan pelaporan keuangan secara rutin dan berkala dari kelompok kepada dinas terkait yang menaungi program KRPL ini.
- b. Kegiatan pendampingan hendaknya dilakukan sampai tahap kemandirian, hal tersebut

dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program KRPL itu sendiri.

- c. Pelaksana KRPL hendaknya menjalin kerjasama dengan media dalam rangka menyiarkan perkembangan pelaksanaan KRPL, hal tersebut dilakukan untuk memotivasi kelompok masyarakat agar lebih meningkatkan semangatnya dalam menjaga dan mempertahankan kegiatan budidaya yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013
- Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Plus Plus Jawa Timur Bagi TP-PKK Desa/ Kelurahan Tahun 2016
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.